

BAB I

PENDAHULUAN

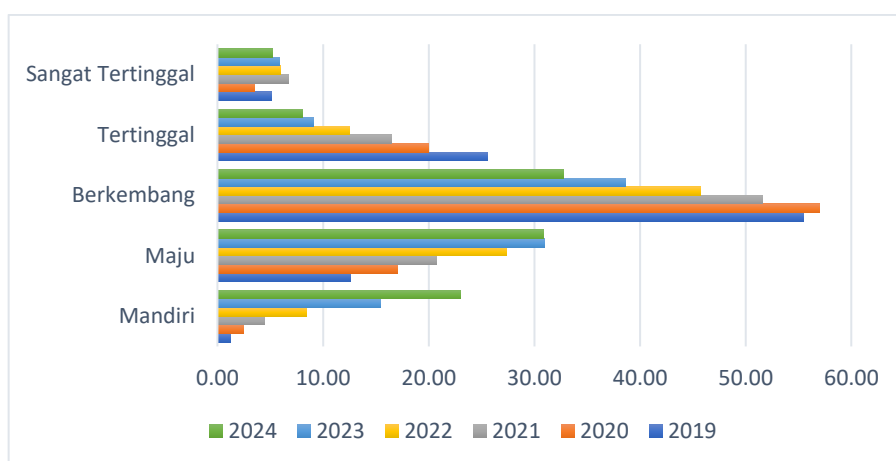
1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam upaya mengurangi ketimpangan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan (Salahudin, 2022). Desa merupakan salah satu unit administratif terkecil di Indonesia dan memainkan peran penting dalam proses pembangunan (Aryani & Sri Wahyuni, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan ruang kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan desa guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, menekan ketimpangan, serta memperkuat perekonomian desa yang bertumpu pada potensi lokal.

Hingga saat ini, pembangunan desa tetap menjadi isu yang relevan mengingat sekitar 43,3% penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan (BPS, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh efektivitas pembangunan di tingkat desa. Namun, pembangunan desa masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain kemiskinan, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, serta permasalahan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan desa tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan secara terpadu (Nadia & Mahi, 2023).

Untuk mengukur perkembangan dan tingkat kemandirian desa, pemerintah menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai salah satu instrumen

evaluasi pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa. Indeks Desa Membangun berfungsi sebagai instrumen resmi pemerintah dalam menilai tingkat kemandirian desa sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan, alokasi anggaran, serta evaluasi kebijakan pembangunan desa secara nasional. Indeks Desa Membangun mengklasifikasikan desa ke dalam lima kategori, yaitu Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal, berdasarkan indikator keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan.



Sumber: Kemendes PDTT, 2025

Gambar 1. 1 Indeks Desa Membangun di Indonesia Tahun 2019-2024

Status desa mandiri di Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebesar 1,22%, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 23,02% pada tahun 2024. Status desa maju juga menunjukkan tren yang serupa, yaitu dari 12,56% pada tahun 2019 menjadi 30,88% pada tahun 2024. Sebaliknya, proporsi desa berkembang mengalami penurunan dari 55,47% pada tahun 2019 menjadi 32,80% pada tahun 2024. Sementara itu, desa tertinggal menurun cukup signifikan dari 25,61% pada tahun 2019 menjadi 8,05% pada tahun 2024. Adapun desa sangat

tertinggal juga menunjukkan penurunan dari 5,14% pada tahun 2019 menjadi 5,24% pada tahun 2024.

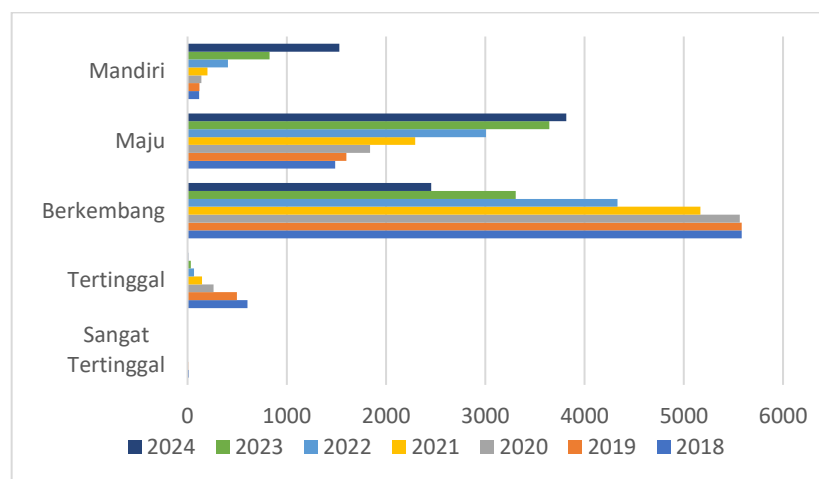
Keberhasilan pembangunan desa tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Tay & Rusmiwari, (2019), menjelaskan bahwa pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kepastian regulasi, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan partisipasi, kondisi geografis, rendahnya pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan, serta konflik kepentingan di tingkat lokal dapat menjadi faktor yang menghambat pembangunan desa. Dengan demikian, pemahaman mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan capaian pembangunan desa menjadi penting untuk menjelaskan perbedaan perkembangan desa antarwilayah.

Salah satu kebijakan yang berkaitan erat dengan pembangunan desa adalah Dana Desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas desa dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memperkuat modal sosial Masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, klasifikasi desa berdasarkan IDM digunakan sebagai salah satu dasar pengalokasian Dana Desa, termasuk kebijakan afirmasi sebesar 3% bagi desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Besarnya dukungan fiskal melalui Dana Desa tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh desa akan mencapai tingkat pembangunan yang

sama. Perbedaan capaian tersebut dapat terjadi karena efektivitas pembangunan desa tidak hanya bergantung pada besarnya sumber daya keuangan, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan dasar, partisipasi masyarakat, serta kondisi lingkungan. Yulitasari & Tyas, (2020) menunjukkan bahwa perubahan jumlah Dana Desa tidak selalu diikuti oleh perubahan status desa secara signifikan.

Provinsi Jawa Tengah menjadi konteks empiris yang menarik untuk dikaji karena merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yaitu lebih dari 8.500 desa, serta memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan yang heterogen (BPS, 2020).



Sumber: Kemendes PDTT, 2025

Gambar 1. 2 Status Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024

Perkembangan status desa di Jawa Tengah selama periode 2018–2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Desa sangat tertinggal tidak lagi ditemukan sejak 2021, dan jumlah desa tertinggal menurun tajam hingga tersisa 8 desa pada tahun 2024. Pada saat yang sama, jumlah desa maju dan mandiri meningkat pesat masing-masing menjadi 3.817 dan 1.528 desa, sementara desa berkembang menurun menjadi 2.456 desa.

Dari sisi fiskal, alokasi Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah relatif besar, yakni sebesar Rp8,20 triliun pada tahun 2020, Rp8,15 triliun pada 2021, Rp8,11 triliun pada 2022, Rp7,85 triliun pada 2023, dan Rp7,95 triliun pada 2024. Meskipun menerima alokasi Dana Desa yang signifikan, sebagian besar desa di Jawa Tengah masih berada pada kategori berkembang.

Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara besarnya dukungan fiskal dan hasil pembangunan desa yang dicapai, sehingga menjadikan Jawa Tengah sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji efektivitas pembangunan desa secara lebih mendalam. Temuan penelitian Anisa *et al.*, 2024 menunjukkan bahwa Ketidak tercapaian hasil pembangunan desa secara optimal menunjukkan bahwa Dana Desa bukanlah satu-satunya faktor penentu kemajuan desa. Efektivitas pemanfaatan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung lainnya.

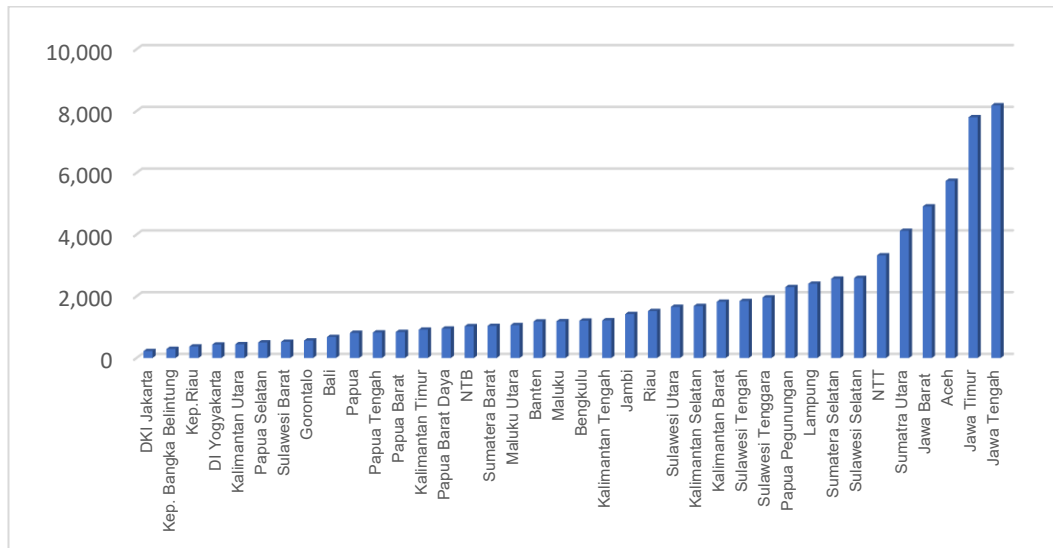
Selain aspek fiskal, ketersediaan fasilitas pendidikan merupakan salah satu aspek yang relevan dalam pembangunan desa. Pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas sumber daya manusia yang selanjutnya dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, ketersediaan fasilitas pendidikan diukur menggunakan rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk. Penggunaan rasio tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan secara relatif terhadap jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten. Dengan demikian, ukuran tersebut tidak hanya mempertimbangkan jumlah sekolah secara absolut, tetapi juga memperhitungkan perbedaan jumlah penduduk antarwilayah. Nugroho (2015) menjelaskan bahwa fasilitas pendidikan yang lebih mudah diakses dapat memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan

keterampilan yang dibutuhkan dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas pendidikan secara relatif terhadap jumlah penduduk menjadi salah satu aspek yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan capaian IDM.

Aspek lain yang berkaitan dengan pembangunan desa adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena kondisi kesehatan masyarakat dapat berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. Ketersediaan tenaga kesehatan dapat mendukung akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan membantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah perdesaan. Keterbatasan tenaga kesehatan dapat menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Marinho *et al.*, (2017) menunjukkan pentingnya sumber daya kesehatan dalam mendukung pembangunan manusia. Oleh karena itu, tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor yang relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan capaian Indeks Desa Membangun.

Selain sumber daya fiskal dan pelayanan dasar, pembangunan desa juga berkaitan dengan modal sosial yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk modal sosial yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat desa adalah gotong royong. Gotong royong mencerminkan kerja sama dan partisipasi kolektif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Nyoman, (2010) menjelaskan bahwa kerja sama masyarakat dapat mendukung

pelaksanaan pembangunan, meskipun keberlangsungannya dapat menghadapi tantangan akibat perubahan perilaku sosial



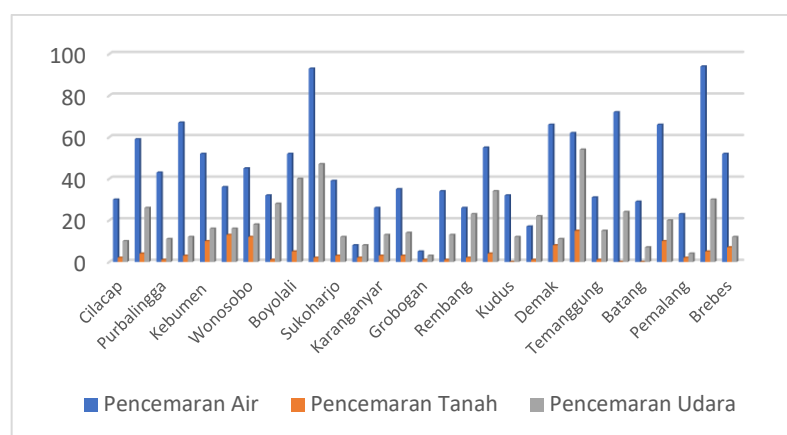
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1. 3 Jumlah Desa/Kelurahan dengan Kebiasaan Gotong Royong di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah memiliki 8.183 desa/kelurahan yang tercatat memiliki kebiasaan gotong royong. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa praktik kerja sama kolektif masih menjadi karakteristik sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat di Jawa Tengah. Kondisi tersebut menjadikan gotong royong relevan untuk dikaji sebagai salah satu aspek sosial yang mungkin berkaitan dengan pembangunan desa. Namun, keberadaan gotong royong tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap capaian IDM selalu positif, karena hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan karakteristik wilayah.

Pembangunan desa juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan. Lingkungan yang memiliki kualitas baik dapat mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat, sedangkan kondisi lingkungan yang mengalami tekanan dapat

menimbulkan risiko terhadap kualitas hidup dan keberlanjutan pembangunan (Kurniawati *et al.*, 2025). Anwar, (2022). menjelaskan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, aspek lingkungan menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, kualitas lingkungan diukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup suatu wilayah.



Sumber: PODES Jawa Tengah, 2024

Gambar 1. 4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pendataan Potensi Desa (Podes) Provinsi Jawa Tengah 2024, tercatat bahwa masih terdapat permasalahan lingkungan yang cukup serius. Gambar 1.4 menunjukkan bahwa pencemaran air merupakan jenis pencemaran yang paling banyak terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2024, dengan Boyolali dan Tegal sebagai wilayah dengan jumlah desa terdampak tertinggi. Pencemaran udara menempati urutan kedua dengan konsentrasi kasus cukup tinggi di Magelang, Boyolali, Semarang, dan Tegal, sedangkan pencemaran tanah relatif paling rendah dan hanya terjadi pada

sebagian kecil desa di beberapa wilayah seperti Banyumas, Jepara, Kendal, dan Brebes. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Jawa Tengah masih didominasi oleh pencemaran air dan udara, sehingga perlu perhatian lebih dalam pengelolaan limbah, peningkatan sanitasi, serta pengawasan aktivitas industri dan domestik (BPS, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan besarnya Dana Desa, tetapi juga berkaitan dengan kondisi pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat, dan lingkungan. Besarnya Dana Desa belum tentu menghasilkan pembangunan desa yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, pelayanan dasar yang baik, partisipasi masyarakat, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, penting untuk menguji hubungan Dana Desa, pendidikan, kesehatan, gotong royong, dan kualitas lingkungan dengan IDM di Provinsi Jawa Tengah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hubungan yang bervariasi antara faktor-faktor tersebut dengan Indeks Desa Membangun. Penelitian yang dilakukan Arina *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Desa Membangun. Sedangkan studi lain menemukan hasil analisis regresi mengungkapkan bahwa perubahan dalam jumlah dana desa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan status desa di provinsi tersebut (Yulitasari & Tyas, 2020). Penelitian yang dilakukan Rezkia & Yunani, (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dampak negatif signifikan.

Sari & Oktavianor (2021), dalam penelitiannya bahwa variabel yang mempengaruhi nilai IDM adalah sarana kesehatan, akses 9 sekolah, akses keterampilan, kebiasaan gotong royong, kegiatan olahraga, keragaman agama,

pos keamanan, akses listrik, akses internet, akses jamban, pasar, pertokoan, warung kelontong dan akses penginapan. Penelitian Setyobakti (2017), menunjukkan bahwa pengaruh gotong royong terhadap IDM tidak signifikan di beberapa wilayah yang telah mengalami modernisasi sosial, karena menurunnya kohesi sosial antar individu. Hasil penelitian yang dilakukan Hariwibowo & Wardhana (2023), menunjukkan bahwa ketahanan lingkungan berpengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM). Beberapa penelitian menemukan bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap IDM, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian juga ditemukan pada variabel pembangunan infrastruktur, gotong royong, dan kualitas lingkungan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada satu atau dua variabel, menggunakan pendekatan deskriptif atau kualitatif, serta dilakukan pada wilayah penelitian yang berbeda sehingga belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai determinan pembangunan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap), baik dari aspek variabel, metode analisis, maupun lokasi penelitian. Penelitian ini mengintegrasikan lima variabel, yaitu Dana Desa, Rasio Jumlah Sekolah, Tenaga kesehatan, gotong royong, dan kualitas lingkungan dalam satu model regresi data panel pada 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018–2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) sekaligus menjadi masukan bagi

pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah?
- 2 Apakah ketersediaan sarana pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah?
- 3 Apakah ketersediaan tenaga kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah?
- 4 Apakah gotong royong berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah?
- 5 Apakah kualitas lingkungan berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh berbagai faktor yang berperan dalam pembangunan desa terhadap tingkat kemandirian desa, dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai indikator pengukuran di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh ketersediaan sarana pendidikan terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah.

3. Menganalisis pengaruh ketersediaan tenaga kesehatan terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh gotong royong terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah.
5. Menganalisis pengaruh kualitas lingkungan terhadap Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi pengembangan pedesaan dan ekonomi pembangunan. Secara akademis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas strategi pengembangan pedesaan dan memperkaya literatur empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pengembangan Pedesaan (IDM) di tingkat kabupaten.

2. Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, temuan studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi beberapa pemangku kepentingan, termasuk:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai acuan dalam merancang kebijakan pengembangan desa yang lebih terarah dan didasarkan pada data Indeks Desa Membangun (IDM).
- b. Pemerintah desa, di mana hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan meningkatkan rencana pembangunan

desa yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja IDM.

- c. Pembuat kebijakan tingkat nasional, sebagai masukan evaluatif untuk menilai efektivitas kebijakan Dana Desa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.